

DAMPAK KEMISKINAN KOTA TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA-KOTA BESAR INDOENSIA

Adi Ardiansyah, SPd. MT.¹

ABSTRACT

Kalau kita bicara mengenai masalah perkotaan, maka kita bicara mengenai masalah, yang salah satunya adalah Kemiskinan Kota yang tidak bukan salah satu penyebabnya adalah Urbanisasi. Dimana setiap kota harus menyusun penaksirannya tentang Kemiskinan Kota sendiri-sendiri secara berbeda-beda dan menggunakan alat-alat dan pendekatan umum dengan tujuan untuk menjawab persoalan yang dianggap paling mendesak oleh penduduk setempat.

Kebijakan kota akan sangat berdampak pada kelompok populasi yang berbeda karena orang-orang miskin tersebut meskipun jauh dari menjadi kelompok yang homogen akan tetapi memiliki kebutuhan dan kesempatan yang berbeda dari kelompok lain didalam kota.

Karakteristik hidup orang miskin berbeda-beda disetiap tempat, sesuai dengan penghasilan yang diperoleh merupakan poin awal untuk menguji variasi objek yang akan dibuat penyesuaiannya bagi individu dalam ruang lingkup kota. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : pertama Kondisi lingkungan dan kesehatan pada kelompok yang berbeda. Penggambaran kondisi hidup beresiko tinggi adalah kunci untuk memahami masalah kemiskinan. Kedua Pola pendapatan dan pengeluaran kelompok. Pola ini akan menunjang pembangunan kota bukan hanya kepada orang yang kaya tetapi tidak akan diragukan si miskin.

Ketiga Resiko kemiskinan relatif dari kelompok yang berbeda di kota.

Kota-kota besar di Indonesia pada saat ini memang menjanjikan kesempatan dan kesejahteraan yang luas dan memperoleh kesempatan maju di kota-kota besar terutama di Indonesia. Memang menurut *sensus BPS* bahwa kemiskinan di Indonesia sudah menurun tajam dari 27 % dalam sensus 1980 menjadi hanya sekitar 15% saja pada sensus 1990, tetapi yang banyak terlupakan adalah bahwa dari angka rata-rata itu, kemiskinan di kota-kota besar masih tinggi persentasinya.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah terutama didaerah perkotaan yang ada adalah kebijaksanaan pengelola kota atau wilayah perkotaan yang terutama untuk menangani masalah dan kinerja masing-masing kota, dimana telah dikeluarkan pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Pembangunan nasional Bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah *Pembangunan Manusia Seutuhnya*, yang terdapat dalam tujuan pembangunan nasional dimana pernyataan itu mempunyai ciri-ciri adalah : *pertama*, memiliki keselarasan hubungan manusia dengan tuhan. *Kedua*, keselarasan hubungan manusia dengan masyarakat. *Ketiga*, pada lingkungan yang dibangun kita harus memperhatikan hubungan manusia dengan alamnya. Kesemua ciri-ciri tersebut mengartikan manusia sebagai insan sosial merupakan faktor utama didalamnya adalah pembangunan yang menitikberatkan untuk kebutuhan dasar manusia, salah-satunya mengenai perumahan.

¹ Adi Ardiansyah, SPd. MT. lahir di Bandung tanggal 23 Januari 1975, sejak tahun 2008 menjadi dosen tetap di Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI lulus tahun 2001, sementara pendidikan S-2 di Program Studi Megister Teknik Arsitektur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan mengambil konsentrasi *Urban Design* lulus tahun 2004. Memulai karier di Konsultan Perencana sebagai asisten arsitek dan arsitek *free lance* di beberapa konsultan lainnya. Fokus penelitian dan kajian di bidang Arsitektur lebih ke masalah lansekap, lingkungan dan perkotaan.

A. PENDAHULUAN

Kalau kita bicara mengenai masalah perkotaan, maka kita bicara mengenai masalah, yang salah satunya adalah Kemiskinan Kota yang tidak bukan salah satu penyebabnya adalah Urbanisasi. Pada waktu penduduk di Indonesia belum mengalami peningkatan yang berarti, dan masalah kemiskinan kota dan urbanisasi bukanlah menjadi masalah yang merisaukan. Terlebih semakin kedepan kita semakin disulitkan oleh masalah kemiskinan kota hingga sekarang ini, dimana terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) secara besar-besaran mengakibatkan masalah perumahan menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah. Pada tahun 1971 tingkat urbanisasi adalah 17%, pada tahun 1990 telah mencapai 31%, dan pada tahun 1993 atau akhir Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) menjadi sekitar 34%. Sedangkan pada akhir PJP II penduduk diperkotaan akan mencapai 51%. Dengan demikian penduduk di Indonesia pada akhir PJP II menjadi penduduk kota (urban). **(Sumber : Kartasasmita Ginanjar, 1994).**

Kota-kota besar di Indonesia pada saat ini memang menjanjikan kesempatan dan kesejahteraan yang luas dan memperoleh kesempatan maju di kota-kota besar terutama di Indonesia. Kemiskinan ini sendiri di kota-kota besar khususnya di Indonesia salah satu penyebabnya adalah urbanisasi, dimana para urbanis yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, lebih-lebih pendidikan di desa cenderung rendah kualitasnya yang akibatnya para urbanis ini akhirnya jatuh miskin di kota-kota karena mereka tidak mampu bersaing dan menjadi penganggur, artinya pembangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang masih cukup besar dari kemiskinan dan disparitas sosial. Kemiskinan dan ketimpangan, hanya sebagian saja dari beban yang cenderung bertambah berat terus, yang ditanggung oleh lingkungan dari unsur kependudukan.

Sehingga banyak para ahli memandang bahwa masalah kemiskinan dan kesenjangan sebagai bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi ledakan sosial, yang pada akhirnya dapat mengancam peri-kehidupan manusia terutama didaerah perkotaan. Disini terlihat adanya suatu kemiskinan pada kota-kota besar di Indonesia juga mengakibatkan penambahan jumlah penduduk yang meningkat pesat yang berarti akan ada penambahan perubahan lingkungan, yang mungkin harus dipikul dengan biaya yang tinggi yang tidak saja oleh daerah yang bersangkutan, melainkan juga oleh lingkungan yang lebih luas.

Adanya penambahan penduduk, berarti pula semakin banyak perumahan yang diperlukan. Dimana ini dapat berarti semakin terdesaknya lingkungan alami, termasuk tanah pertanian. Selain perubahan penggunaan tanah, pembangunan perumahan pun akan berakibat kepada semakin besarnya eksploitasi sumber daya alam yang digunakan untuk bahan bangunan.

Sehingga masalah perumahan dan pemukiman di Indonesia, sebagaimana yang terjadi dinegara-negara yang sedang berkembang lainnya didunia, mencerminkan salah satu dampak dari proses pembangunan umumnya. Melihat penjelasan diatas, Laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat di kota-kota besar telah menimbulkan akibat yang selalu memprihatinkan terhadap meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan pemukiman. Sehingga adapun penanggulangannya dapat dilakukan dengan mengarahkannya dan mengusahakannya untuk setahap demi setahap dapat membatasi lajunya pertumbuhannya dan mengurangi kemiskinan.

Sehingga jelas terlihat bahwa perkembangan kota di Indonesia ini tidak terlepas dari perkembangan tingkat Urbanisasi yang berkaitan erat dengan penambahan penduduk dan perkembangan ekonomi ini bisa dilihat dari hasil penelitian diatas. Untuk mengimbangi penambahan penduduk dan kemiskinan kota yang cukup meningkat, oleh karena itu pembangunan bukan hanya

ditujukan kepada kuantitas dari pembangunan tersebut tapi ditujukan pula untuk mewujudkannya secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, serta hakekat dari fungsi-fungsi yang ingin dicapai.

Dengan demikian pembangunan perumahan dan permukiman tidak mungkin dipisahkan dari pembangunan manusia, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi baik lokal maupun global, terutama dengan tujuan mengurangi kemiskinan di Kota-Kota besar Indonesia.

Uraian latar belakang permasalahan ini dilihat dari kemiskinan di perkotaan dimana ini dapat mendorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan **penduduk perkotaan terutama Kemiskinan Kota dalam hubungannya dengan perumahan dan lingkungan pemukiman diperkotaan** yang **berkesinambungan** dengan adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk mengupas dan memberikan arah dan memperhatikan sasaran secara **kualitatif** dan **kuantitatif** sehingga dalam melihat permasalahan ini dapat dilihat kejelasan-kejelasan permasalahan yang ada.

B. KEMISKINAN KOTA

Dikarenakan Populasi kota di dunia yang sedang berkembang ini meningkat, baik dalam persayaratan-persayaratan tertentu dan sebagai suatu proporsi dari populasi secara total, sehingga sebuah tantangan besar tersisa; **mengatasi Kemiskinan.**

Laporan pembangunan dunia dari Bank Dunia pada tahun 1990 menyoroti masalah kemiskinan. Dimana hal ini difokuskan **pada Dimensi Pendapatan**, “kemiskinan yang diukur dengan rendahnya pendapatan cenderung menjadi lebih buruk didaerah-daerah pedesaan”, laporan ini jelas menunjukkan meskipun

memperkenankan perbedaan-perbedaan yang seringkali substansial dalam biaya hidup antara kota dan pedesaan.

Adapun konsep dalam analisis kemiskinan pada tahun 1990-an, dimana konsep tersebut adalah Konsep Vulnerability, dimana konsep ini menjadi penting dalam analisis kemiskinan pedesaan dan kota, dan dalam penyusunan kebijakan tersebut diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan karena pada tahun 1990-an, kemiskinan kota telah semakin menjadi pusat kebijakan.

Adapun kontribusi-kontribusi yang berhubungan dengan kebijakan dalam hal pengurangan daerah kemiskinan pada tingkat Kota, menurut **Jesko Hentshel** dan **Radha Seshagiri** menjelaskan tentang hal tersebut yang disebut dengan **penaksiran kemiskinan kota**. Dimana setiap kota harus menyusun penaksirannya sendiri-sendiri secara berbeda-beda dan menggunakan alat-alat dan pendekatan umum dengan tujuan untuk menjawab persoalan yang dianggap paling mendesak oleh penduduk setempat. Adapun proses penaksiran bisa jadi penting dalam pembentukan kerjasama yang baru dan lebih efektif dalam penurunan kemiskinan kota.

Sehingga dengan jelas bahwa kota-kota tersebut harus melihat kepada berbagai sektor yang ada dan konsep-konsep yang telah berlaku pada masyarakat sehingga kota-kota tersebut diharapkan tanggung jawabnya bagi orang-orang miskin dan Vulnerable dalam perundang-undangan mereka, pendekatan baru dan kerjasama yang lebih kompleks dan inisiatif-inisiatif dibatasi agar muncul suatu penurunan kemiskinan diseluruh dunia terlebih dinegara berkembang.

C. PENAKSIRAN KEMISKINAN KOTA

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintahan kota dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk menanggapi kondisi yang buruk dari kemiskinan kota. Ini terlihat pada kota-kota diseluruh dunia yang telah tumbuh luar biasa,

dan di beberapa daerah tempat-tempat kemiskinan telah berubah dari daerah pedesaan ke kota sebagai akibat migrasi yang terlihat dari angka kematian kota menurun dan tingginya tingkat kesuburan.

Pertumbuhan yang cepat di beberapa kota telah ada dimensi kemiskinan yang khas seperti bahaya kesehatan dari polusi udara dan air yang tercemar, jalan yang penuh dengan kemacetan lalu lintas, kejahatan yang disebabkan karena kemiskinan ketidakseimbangan dan banyak lagi serta terus berlanjut. Banyak kota, khususnya Amerika Latin telah menjadi sasaran dari serangkaian studi, diantaranya meneliti dengan detail tingkat-tingkat kerugian atau kekurangan persediaan di lokasi-lokasi tertentu. Studi ini merupakan alat untuk merencanakan suatu kota, penyediaan informasi penting dan tidak ketinggalan yaitu apa yang ingin diketahui oleh pemegang kebijakan kota tentang kapan kebijakan-kebijakan kota dan proyek-proyek dibangun untuk mengurangi kemiskinan.

Kebijakan kota akan sangat berdampak pada kelompok populasi yang berbeda karena orang-orang miskin tersebut meskipun jauh dari menjadi kelompok yang homogen akan tetapi memiliki kebutuhan dan kesempatan yang berbeda dari kelompok lain di dalam kota.

D. GAMBARAN DASAR PROFIL KEMISKINAN KOTA BESAR

Langkah yang terpenting pertama dalam menganalisa kemiskinan adalah menyusun gambaran kemiskinan, hal ini meliputi banyak hal, siapa si miskin, dimana mereka tinggal, bagaimana mereka tinggal, peran mereka dan fungsi pelayanan pemerintah, standar kesehatan hidup mereka, pendidikan, gizi dan pertahanan.

Dimensional Geografis Kota

Tabel dibawah ini akan menunjukkan distribusi pendapatan di Karachi, Pakistan dimana didalam tabel tersebut berisi perbedaan tingkat kemiskinan serta menunjukkan dimensi penting lain dari kemiskinan.

Tabel. Kelompok-Kelompok Miskin di Karachi, 1990.

Wilayah	Tingkat Kemiskinan	Keluarga Miskin Sebagai Presentasi Semua Keluarga Miskin	Penyebaran Populasi
- Old City	61	18	12
- Old Settlements	56	10	17
- Korangi	49	12	10
- Site	59	27	18
- Service Area	54	11	8
- Rural Fringe	67	7	4
- All Affluent Areas	15	16	41

Karakteristik Keluarga Miskin

Tugas utama gambar kemiskinan adalah menggambarkan lingkaran kehidupan miskin di kota. Perbandingan ini bisa menunjukkan bagaimana karakteristik keluarga miskin bisa berbeda, misalnya, pendapatan keluarga disatu wilayah bisa tidak mempengaruhi pelayanan dasar sedangkan ditempat lain justru mempengaruhi.

Perbandingan karakteristik keluarga Miskin Dengan Kaya

Sekarang tipe karakteristik lingkungan hidup yang sama bisa digunakan untuk membandingkan kelompok orang miskin dengan orang kaya. Perbandingan akan menunjukkan bahwa karakteristik orang miskin sama, keberadaan mereka dibedakan dari kelompok yang lebih baik. Contohnya, ternyata besarnya orang miskin tidak mempengaruhi faktor air, karena kurangnya populasi kota hanyalah sebagai akses semata.

Dimensi Penting dari Kehidupan Perkotaan

Karakteristik hidup orang miskin berbeda-beda disetiap tempat, sesuai dengan penghasilan yang diperoleh merupakan poin awal untuk menguji variasi objek yang akan dibuat penyesuaiannya bagi individu dalam ruang lingkup kota. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungan dan kesehatan pada kelompok yang berbeda. Penggambaran kondisi hidup beresiko tinggi adalah kunci untuk memahami masalah kemiskinan.
- b. Pola pendapatan dan pengeluaran kelompok. Pola ini akan menunjang pembangunan kota bukan hanya kepada orang yang kaya tetapi tidak akan diragukan si miskin.
- c. Resiko kemiskinan relatif dari kelompok yang berbeda di kota.

E. PEMAHAMAN ARTI KEMISKINAN

Penaksiran dan penggambaran kondisi kemiskinan merupakan komponen penting dari CPA, jenis alat-alat lainnya bisa membantu memahami arti perkembangan kemiskinan dengan lebih baik, berikut adalah sarana-sarana pendukung dan kualitatif yang bisa digunakan :

- a. Mengukur bagaimana komunitas miskin memahami kemiskinan dan berkecimpung dengan keadaannya.
- b. Periksa apakah kelompok-kelompok yang berbeda dalam komunitas menghadapi serangkaian masalah dalam memerangi kemiskinan dengan cara yang berbeda dari yang lain.
- c. Identifikasi kelompok yang mudah tertindas pada waktu yang sulit.
- d. Utamakan indikator-indikator kemiskinan yang bisa dikerjakan.

- e. Pelajari pandangan-pandangan mereka yang memiliki kemungkinan menghambat program pengurangan kemiskinan.

F. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA

Kota-kota besar di Indonesia pada saat ini memang menjanjikan kesempatan dan kesejahteraan yang luas dan memperoleh kesempatan maju di kota-kota besar terutama di Indonesia. Memang menurut **sensus BPS** bahwa kemiskinan di Indonesia sudah menurun tajam dari 27 % dalam sensus 1980 menjadi hanya sekitar 15% saja pada sensus 1990, tetapi yang banyak terlupakan adalah bahwa dari angka rata-rata itu, kemiskinan di kota-kota besar masih tinggi persentasinya.

Kemiskinan ini sendiri di kota-kota besar khususnya di Indonesia salah satu penyebabnya adalah urbanisasi, dimana para urbanis yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, lebih-lebih pendidikan di desa cenderung rendah kualitasnya yang akibatnya para urbanis ini akhirnya jatuh miskin di kota-kota karena mereka tidak mampu bersaing dan menjadi penganggur.

Hal ini terlihat dari rata-rata laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga perbulan dari 40% penduduk berpendapatan terendah hanya sebesar 3,8 % per tahun dalam kurun waktu yang sama adalah 4, 8% per tahun (**Sumber : Tjuk K dan Suparti A. 1997**), artinya pembangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang masih cukup besar dari kemiskinan dan disparatis sosial. Kemiskinan dan ketimpangan, hanya sebagian saja dari beban yang cenderung bertambah berat terus, yang ditanggung oleh lingkungan dari unsur kependudukan.

Sehingga banyak para ahli memandang bahwa masalah kemiskinan dan kesenjangan sebagai bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi ledakan sosial, yang pada akhirnya dapat mengancam peri-kehidupan manusia

terutama didaerah perkotaan. Disini terlihat adanya suatu kemiskinan pada kota-kota besar di Indonesia juga mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat pesat yang berarti akan ada pertambahan perubahan lingkungan, yang mungkin harus dipikul dengan biaya yang tinggi yang tidak saja oleh daerah yang bersangkutan, melainkan juga oleh lingkungan yang lebih luas.

Adanya pertambahan penduduk, berarti pula semakin banyak perumahan yang diperlukan. Dimana ini dapat berarti semakin terdesaknya lingkungan alami, termasuk tanah pertanian. Selain perubahan penggunaan tanah, pembangunan perumahan pun akan berakibat kepada semakin besarnya eksploitasi sumber daya alam yang digunakan untuk bahan bangunan.

Sehingga masalah perumahan dan pemukiman di Indonesia, sebagaimana yang terjadi dinegara-negara yang sedang berkembang lainnya didunia, mencerminkan salah satu dampak dari proses pembangunan umumnya. Melihat penjelasan diatas, laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat di kota-kota besar telah menimbulkan akibat yang selalu memprihatinkan terhadap meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan pemukiman.

Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut saat ini belum diimbangi dengan penyediaan perumahan yang memadai. Sejak **Pelita II** hanya sekitar 15 % dari jumlah rumah yang dibutuhkan dapat disediakan sektor formal (BUMN dan Swasta) dalam suatu lingkungan yang direncanakan dan teratur, serta memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan, sedangkan yang 85% disediakan melalui sektor informal. Akibatnya banyak terjadi pemukiman yang tidak teratur tanpa sarana dan prasarana yang jelas.

Kemiskinan di daerah perkotaan menyebabkan kelompok masyarakat yang berpenghasilan terendah nasibnya lebih buruk karena mereka bahkan tidak mampu untuk menempati rumah-rumah kumuh seperti yang telah dijelaskan diatas dimana dikarenakan tingginya harga tanah dan bahan bangunan

menyebabkan suatu keterpaksaan membangun gubuk-gubuk liar diatas tanah-tanah kosong yang tidak diawasi oleh pemilik atau penguasanya. Banyak diantara mereka menggunakan lahan-lahan kosong yang sengaja digunakan untuk bantaran banjir, jalur kereta api dan lokasi-lokasi lain terutama yang dekat dengan tempat kerja mereka. Dilihat dari penjelasan diatas proses-proses pembangunan oleh sektor-sektor informal tersebut menghasilkan banyak lingkungan perumahan kumuh (**slums**) yaitu lingkungan perumahan yang padat dan tidak memiliki prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi syarat teknis ataupun kesehatan.

Dengan melihat seluruh deskripsi diatas, maka peningkatan kebutuhan perumahan serta perkembangan permukiman kumuh dan liar akibat adanya kemiskinan kota akan semakin meningkat pesat. Memang bila ditinjau dari sisi tersebut terdapat suatu nilai pesimis untuk dapat menyediakan sarana permukiman dengan kondisi kemiskinan dan indikator ekonomi yang menurun dengan tajam pada saat ini.

Oleh karena itu dalam waktu dekat ini apa yang diusahakan dan dilakukan oleh pemerintah setahap demi setahap dapat membatasi lajunya pertumbuhan. Selain itu selain kebijaksanaan pemerintah yang mencegah laju pertumbuhan secara alami dan dikarenakan urbanisasi, tetapi juga berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atau penduduk kota sebagai makhluk sosial terutama dari segi perekonomian dan pembangunan perumahan serta permukiman.

G. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

Salah satu kebijaksanaan pemerintah terutama didaerah perkotaan yang ada adalah kebijaksanaan pengelola kota atau wilayah perkotaan yang terutama untuk menangani masalah dan kinerja masing-masing kota, dimana telah dikeluarkan pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Pembangunan

nasional Bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah **Pembangunan Manusia Seutuhnya**, yang terdapat dalam tujuan pembangunan nasional dimana pernyataan itu mempunyai ciri-ciri adalah : **pertama**, memiliki keselarasan hubungan manusia dengan tuhan. **Kedua**, keselarasan hubungan manusia dengan masyarakat. **Ketiga**, pada lingkungan yang dibangun kita harus memperhatikan hubungan manusia dengan alamnya. Kesemua ciri-ciri tersebut mengartikan manusia sebagai insan sosial merupakan faktor utama didalamnya adalah pembangunan yang menitikberatkan untuk kebutuhan dasar manusia, salah-satunya mengenai perumahan.

Adapun untuk pemenuhan aspek perumahan dan permukiman yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan terendah pada kota-kota di Indonesia dikarenakan kemiskinan yang terjadi pada kota-kota di Indonesia saat ini yang meningkat dengan pesat. Upaya pemenuhan kebutuhan umumnya mereka penuhi sendiri. Akan tetapi peran sektor masyarakat terutama kaum yang berpenghasilan terendah sebagai penyedia akan mulai digantikan oleh sektor formal.

Oleh sebab itu membiarkan pembangunan permukiman ke tangan masyarakat secara spontan dan individual, seperti yang telah banyak terjadi dikota-kota besar di Indonesia (contoh : bantaran banjir, jalur kereta api dan lokasi-lokasi lain), juga bukan tindakan yang bijaksana. Namun pengalaman pun memperlihatkan bahwa sektor publik apalagi swasta, tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat yang berpenghasilan terendah, yang jumlahnya lebih besar dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Berlatar belakang konsep manusia sebagai subjek pembangunan, maka muncullah pendekatan pembangunan perumahan yang bertumpu pada kelompok masyarakat, yang bahkan sudah dituangkan kedalam bentuk **Keputusan Menteri Perumahan Rakyat, pada tahun 1994**. Dengan pendekatan ini, maka anggota

masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama secara spasial dan atau pekerjaan atau kepentingan bersama lainnya, yang membutuhkan perumahan, diorganisasikan agar mampu bertindak menjadi pengembang permukiman bagi kebutuhan kelompoknya. Dalam pelaksanaan pembangunan fisiknya, kelompok ini dapat berlaku sebagai pengembang lain, yaitu menggunakan kredit, tenaga kontraktor dan lain sebagainya dengan keputusan akhir berada ditangan sendiri.

Pelaksanaan konsep ini umumnya memadu dengan tujuan-tujuan pemberdayaan, terutama jika kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu. Dalam SK Menteri tahun 1994 itu, disebutkan perlunya ada peran Konsultan Pembangunan, yang akan mendampingi kelompok tersebut melalui proses pembelajaran pembangunannya.

Pendekatan ini menjanjikan terbentuknya permukiman yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang bersangkutan, komunitas hunian yang lebih padu dan siap untuk mengelola permukimannya. Kedalam organisasi ini informasi mengenai keberlanjutan tentang permukiman dapat disebarluaskan, akan tetapi proses pengorganisasiannya mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, untuk menjadi organisasi yang mendapat kepercayaan dari pemegang sumber daya, seperti misalnya perbankan dan pemerintahan kota, sehingga dapat membangun.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas tentang kebijaksanaan pemerintah tentang perumahan dan permukiman diperkotaan, ada pun kebijaksanaan pemerintah dalam hal pembangunan perumahan dikota-kota besar di Indonesiaditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga kota, dengan sasaran strategis pada umumnya yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membuat permukiman baru yang ideal yang dileksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan terencana.

Melihat arti strategis masalah permukiman bagi kesejahteraan kota yang saat ini banyak mengalami dilema kemiskinan kota, maka pemerintah dengan terencana dan melaksanakan program-program penyehatan lingkungan permukiman dengan sebaik-baiknya antara lain dengan program-program perbaikan kampung, pengelolaan lingkungan (sampah, kebersihan, keindahan dan ketertiban), pembangunan rumah susun, pembangunan perumahan untuk masyarakat golongan tidak mampu dan lain sebagainya.

Agar tujuan pemerataan dan pengentasan kemiskinan serta pemenuhan kebutuhan yang terjadi pada perkotaan dapat terlaksana maka prioritas ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain penyediaan Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun dan lain-lain yang kesemuanya diharapkan dapat memperbaiki struktur sosial masyarakat yang terlihat pada kemiskinan kota dapat diredam dengan baik. Khusus untuk lingkungan permukiman kumuh akibat dari masyarakat yang berpenghasilan rendah dipusat kota, pemerintah telah melakukan program antara lain adalah ;

1. Program perbaikan kampung dengan memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan serta sarana dan prasarana.
2. Program uji coba peremajaan lingkungan kumuh dan perumahan kumuh yang ada serta menggantinya dengan rumah susun yang memenuhi syarat.

Dalam peremajaan lingkungan, pada prinsipnya adalah bahwa penduduk lama tetap diusahakan agar dapat ditampung kembali dalam rumah yang dibangun dilokasi yang sama atau berdekatan agar kondisi perumahan menjadi lebih baik, mereka tidak akan kehilangan segi-segi positif dari lokasi yang lama yang telah dirasakan sebelumnya.

Menurut penjelasan diatas tentang kebijaksanaan pemerintah tentang perumahan dan permukiman yang ada dikarenakan kemiskinan kota dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, dapat disimpulkan bahwa dengan

membangun intuisi masyarakat dan pemerintah daerah, tampaknya akan menjadi kunci terbukanya jalan menuju permukiman yang berwawasan lingkungan. Pembangunan ini syarat dengan keterkaitan tindakan, dan semua pelaku harus mempunyai etika membangun yang sehat. Untuk menegakkan etika tersebut, penting adanya asosiasi profesi yang kuat dibidang perencanaan dan perancangan, misalnya ada sanksi profesional kepada pelaku yang menyimpang dari cita-cita yang luhur tersebut. dan juga memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan dan bergolongan rendah tentang pemukiman yang layak huni dan lingkungannya.

H. UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA DALAM KAITANNYA DENGAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI KOTA BESAR INDONESIA

Untuk menghadapi masalah kemiskinan kota yang sedang marak dan hubungannya dengan perumahan dan permukiman di kota-kota besar di Indonesia diperlukan kerjasama yang menyeluruh antara sektor sosial-ekonomi serta fisik prasarana. Adapun upaya penanggulangan kemiskinan kota yang terlihat pada pembangunan perumahan dan permukiman dikota-kota besar adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Sosial

Para Urbanis mayoritas memiliki perilaku negatif informal, memiliki mata pencaharian antara lain seperti kuli bangunan, penarik becak, loper koran, pedagang keliling, pemulung, preman, bisnis prostitusi dan lain sebagainya, dimana dari deretan terakhir merupakan golongan rawan kriminalitas. Untuk mengembalikan posisi mereka dalam jajaran masyarakat yang normal diperlukan pembinaan untuk memperbaiki kehidupannya, antara lain ;

- a. Kegiatan mental dan spritual.
- b. Kegiatan pembinaan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan di sektor-sektor formal.
- c. Berbagai kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan sehari-hari.

2. Program Fisik

Program fisik menyangkut pada masalah penyediaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah atau tidak mampu. Beberapa alternatif adalah sebagai berikut :

a. Program Pondok Boro

Pondok Boro yaitu suatu lingkungan dimana terdapat bangunan yang terdiri dari petak-petak rumah yang disewakan bagi para pendatang. Satu unit bangunan bisa dihuni oleh banyak keluarga, kegiatan yang terjadi didalamnya bisa bermacam-macam namun juga bisa homogen.

Adapun kelemahan dari program ini adalah mahalnya ongkos sewa, kondisi lingkungan cenderung tidak sehat dan keberadaan pondok boro biasanya berada pada pusat kota sehingga sering menjadi kampung kumuh.

Sedangkan kelebihan dari program ini adalah karena keberadaannya dipusat kota berarti dekat dengan tempat bekerjanya karena bagaimanapun kehadiran sektor informal ini sangat membantu kehidupan warga kota seperti pedagang keliling, tukang becak dan lain-lain.

b. Program Resettlement

Program ini bekerja dengan cara memindahkan para kaum urbanis yang hampir semua mempunyai penghasilan rendah disuatu lokasi yang berada dipinggiran kota serta didukung oleh program pembinaan sosial. Program ini membutuhkan dana tidak sedikit, oleh karenanya diperlukan

penanggung dana serta suatu lembaga yang berlatar belakang sosial untuk melakukan pembinaan.

Adapun kelemahan dari program ini adalah diperlukannya dana yang cukup besar, lokasi jauh dari pusat kota sehingga diperlukan sarana transportasi yang cukup dan seringkali terjadi kegagalan, karena para pemukim gagal menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, karena terbiasa dengan kemudahan-kemudahan yang biasa diperoleh dipusat kota.

Sedangkan kelebihan dari program ini adalah berlokasi dipinggir kota, sehingga kota terhindar dari kekumuhan dan membantu mengembangkan daerah pinggiran kota.

Salah satu contoh program ini telah berjalan adalah **Program Resttlement YSS dikota Semarang**. Dimana YSS membantu pemerintah dalam mengatasi pemukiman liar, dengan merelokasi para pendatang liar ini sehingga akhirnya menjadi penduduk yang legal. Oleh sebab itu pemerintah amat diharapkan guna menyempurnakan lingkungan pemukiman baru ini misalkan dengan program perbaikan kampung, perbaikan rumah dan program K3 untuk mendapatkan kualitas fisik dari lingkungan pemukiman yang baik dan sehat.

Pemerintah juga diharapkan dapat bekerjasama dengan para pemukim liar dengan adanya pembinaan sosial seperti kegiatan mental dan spritual, kegiatan untuk meningkatkan kemampuan para pemukim dimana kegiatan tersebut bukan hanya sesaat akan tetapi lebih pada bantuan yang sifatnya meruapakn stimultor untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi didaerah perkotaan ini.

3. Transmigrasi

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk didaerah-daerah yang padat adalah Program Transmigrasi.

Transmigrasi di Indonesia mengalami berbagai tahap perkembangan, yaitu semasa jaman penjajahan yang pada waktu itu disebut dengan kolonialisasi, jaman kemerdekaan dan program transmigrasi yang dilakukan secara terprogram sejak PELITA I. **(sumber ; Siswono Yudohusodo, Ir. Rumah Untuk seluruh rakyat. 1991).**

Selain penyebaran penduduk, kegiatan transmigrasi diharapkan dapat menunjang pencapaian Trilogi Pembangunan melalui penyebaran tenaga kerja yang terampil, penyebaran usaha, peningkatan mutu kehidupan penduduk yang terlibat dalam pembangunan transmigrasi.

Ada beberapa bentuk transmigrasi yang dikenal selama ini, yaitu berupa : transmigrasi umum, transmigrasi keluarga, transmigrasi atas biaya sendiri, transmigrasi spontan dan transmigrasi lokal. Dimasa-masa mendatang akan lebih ditingkatkan pelaksanaan transmigrasi swakarsa. **(Siswono Yudohusodo, Ir. Rumah Untuk seluruh rakyat. 1991).**

Dari beberapa indikasi yang ada dan didasarkan kepada angka-angka statistik, kondisi perumahan di Indonesia berdasarkan aspek kependudukan yang sedang marak saat ini, pada umumnya dapat dikatakan membaik, sehingga usaha-usaha yang mengarah kepada perumahan dan lingkungan pemukiman didaerah perkotaan yang layak, sehat, teratur dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat, khususnya didaerah perkotaan dapat tercapai secara bertahap. Untuk mencapai hal itu, memang membutuhkan waktu, keuletan serta kesabaran dan keberhasilan kita sekalian, pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, usaha-usaha swasta, BUMN dan koperasi serta masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan, keswakarsaan dan keswadayaan masyarakat agar perumahan dan lingkungan pemukiman baik didesa maupun di perkotaan pada umumnya dapat tercapai dan berkesinambungan untuk masa yang akan datang.

PENUTUP

Beberapa ulasan diatas mengenai dampak kemiskinan kota yang berpengaruh dalam perumahan dan lingkungan pemukiman didaerah perkotaan ditinjau dari beberapa aspek yang lain, yang mana aspek-aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Masing-masing tidak dapat dilihat secara sepotong-sepotong tetapi dalam aspek yang lebih luas.

Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan diatas, bahwa penduduk tumbuh dan berkembang secara alami maupun dikarenakan urbanisasi yang menimbulkan kemiskinan kota yang menapak jauh keatas, dimana penduduk ini melakukan aktivitas untuk kebutuhan mereka seperti aktivitas ekonomi dan sosial tetapi dengan keahlian yang seminim mungkin. Dalam melakukan aktivitas ini para kaum urbanis disini mulai memikirkan pertumbuhan dan perkembangan lingkungan tempat tinggal mereka agar mereka dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain dan dekat dengan pusat kota sebagai tempat hidup mereka.

Tetapi pembangunan perumahan oleh inisiatif mereka telah banyak mengganggu lingkungan seperti mereka tinggal dibantaran sungai, samping rela kereta api dan sebagai dikarenakan mereka tidak mampu membeli rumah maupun tanah yang mahal harganya.

Oleh karena hal tersebut pemerintah mulai memikirkan kebijaksanaan dan konsep yang berkelanjutan terhadap perumahan dan permukiman dari para urbanis ini agar menjadi lingkungan pemukiman yang serasi, harmonis, teratur, berguna serta akan mendukung peningkatan taraf hidup yang lebih baik berbudaya dan berkepribadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Budiharjo. 1984. **Sejumlah Masalah Permukiman Kota**. Penerbit Alumni, Bandung.
- Ginandjar Kartasasmita. 1994. **Kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan Dalam Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Ke II dan Implementasinya Pada Repelita VI**. Musyawarah Antar Kota Seluruh Indonesia ke XI, Surakarta.
- Herlianto M. Th. 1997. **Urbanisasi, Pembangunan Dan Kerusakan Kota**. Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Mila Freire dan Richard Stern. **The Challenge of Urban Government : Urban Policies and Practices**.
- Parsudi Suparlan, 1996. **Diktat Antropologi Perkotaan**. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Siswono Yudohusodo. 1991. **Rumah Untuk Segala Rakyat**. Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.
- Tjuk Kuswartoyo dan Suparti Amir Salim, 1997. **Perumahan Dan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan**. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.